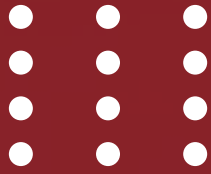




PEMERINTAH
KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

RENJA TAHUN 2026



www.dprd.denpasarkota.go.id



(0361) 237919, 237920 Fax 237921



dprdkotadps@gmail.com



Jl Melati No 17 Denpasar



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

9. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota setiap triwulan melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 September 2025



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA PACUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
2. RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
3. RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2026
4. RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
5. RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
6. RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
7. RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
8. RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
9. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2026
10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
11. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
12. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2026
13. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
14. RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
15. RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026
16. RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
17. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2026
18. RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
19. RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
20. RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
21. RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
22. RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
23. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
24. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
25. RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2026

26. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
27. RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
28. RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
29. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
30. RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026
31. RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
32. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2026
33. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2026
34. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2026
35. RENCANA KERJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2026
36. RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

GUSRI NGURAH JAYA NEGARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil merampungkan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjabarkan Visi, Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya, sekaligus merealisasikan capaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Denpasar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Selanjutnya kami berharap penyusunan Rencana Kerja ini dapat merepresentasikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dipergunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 2 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	16
2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	30
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar	31
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	43
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	46
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024.....	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Denpasar.....	23
Tabel 2.5	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Denpasar	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar	31
	Tabel 3.1.1 Tren Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Internal Sekretariat DPRD	33
	Tabel 3.1.2 Tujuan dalam Rancangan Renstra Tahun 2025-2029.....	33
	Tabel 3.1.3 Tren Capaian Kinerja Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD.....	35
	Tabel 3.1.4 Sasaran dalam Rancangan Renstra Tahun 2025-2029	35
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Denpasar.....	38
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026	43
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah tugas Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana pembangunan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra OPD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Penjabaran dari Renstra sebagaimana dimaksud, maka Sekretariat DPRD Kota Denpasar membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam hal ini, Renja yang disusun setiap tahun memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator dan target kinerja dan pendanaan rencana pelaksanaan. Serta disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan penyusunan Renja juga perlu memperhatikan isu-isu strategis, pelaksanaan responsif gender dan pengelolaan manajemen risiko. Penetapan indikator dan target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan yang dimuat dalam Renja mengacu dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti Rencana Strategis, RKPD, dan RPJMD. Namun, indikator dan target kinerja dalam Renja dapat berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk bersinergi mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu "***Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju***". Misi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar

adalah misi 3 yaitu “**Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**”.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7);
21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 27).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026 adalah sebagai penjabaran program dan kegiatan yang secara operasional untuk mewujudkan visi misi dan program kerja Walikota Denpasar selama 1 (satu) tahun. Tujuan disusunnya rencana kerja adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra selama 1 (satu) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran program / kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD yang meliputi:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB V Penutup

Bab ini menyajikan tentang ringkasan rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2026 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026. Terkait dengan hal tersebut Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar perkiraan capaian tahun berjalan 2024.

Evaluasi bertujuan untuk menindaklanjuti realisasi pencapaian kinerja dan kendala yang dihadapi selama pencapaian rencana kerja bersangkutan melalui perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi Renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output dari pelaksanaan fisik kegiatan dan keuangan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan tahun 2024. Berikut penjabaran review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun 2024, terdapat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja atas hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini terjadi karena (1) program/kegiatan pelaksanaan fasilitasi agenda dewan disesuaikan dengan jadwal agenda dewan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan agenda lain diluar jadwal tersebut yang dibutuhkan, (2) belum dilakukan penyesuaian target kinerja pada saat penyusunan rencana kerja perubahan, dan (3) merupakan tahun peralihan masa jabatan anggota dewan dari DPRD periode 2019-2024 menjadi DPRD periode 2024-2029 yang mempengaruhi fasilitasi tugas dan fungsi dewan. Berikut adalah Penjabaran program/kegiatan yang tidak memenuhi target :

- 1) Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 99.58% dari target 100%. Pemenuhan Layanan kesekretariatan diukur berdasarkan perolehan capaian kegiatan yang mendukung. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dari 6 kegiatan, yaitu :

- a. Administrasi umum Perangkat Daerah, capaian kinerja kegiatan dalam melaksanakan penatausahaan administrasi umum sebesar 99% dari target 100% yang diukur berdasarkan perolehan capaian sub kegiatan yang mendukung. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu :
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 4 paket dari target 5 paket peralatan rumah tangga yang disediakan atau sebesar 1.69% dari target 2.11%. Tidak mencapai target kinerja karena belum dilakukan penyesuaian target kinerja pada saat penyusunan perubahan Rencana Kerja tahun anggaran 2024. Penetapan target kinerja 5 paket tersebut terdiri dari penyediaan pengisian tabung pemadam dan tabung gas, penyediaan perabot kantor dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, serta penyediaan perlengkapan dinas. Penyediaan perlengkapan dinas telah dievaluasi Bersama TAPD Kota Denpasar untuk digabung pada penyediaan perabot kantor, sehingga seharusnya paket pekerjaan menjadi 4 paket.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 11 laporan dari target 12 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD atau sebesar 6.36% dari target 6.93%. Tidak mencapai target kinerja karena penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi tersebut dilakukan sesuai dengan penerimaan surat undangan dan sesuai kebutuhan.
- b. Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Capaian kinerja kegiatan Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 98.55% dari target 100%, yang diukur berdasarkan perolehan capaian sub kegiatan yang mendukung. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu :
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 9 paket dari target 12 paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan atau sebesar 4.15% dari target 5.53%. Tidak mencapai target kinerja karena 3 paket yang tidak terrealisasi tersebut disediakan untuk 3 orang dalam PAW DPRD 2024-2029.
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 31 orang dari target 45 orang

atau sebesar 0.16% dari target 0.23%. Tidak mencapai target kinerja karena terdapat anggota DPRD yang telah melakukan MCU secara mandiri tanpa difasilitasi menggunakan APBD.

- c. Layanan administrasi DPRD, dalam memfasilitasi penyelenggaraan hak administrasi DPRD yang diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan DPRD Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Capaian kinerja kegiatan Layanan administrasi DPRD sebesar 99.93% dari target 100%, yang diukur berdasarkan perolehan capaian sub kegiatan yang mendukung. Namun, terdapat salah satu sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu sub kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD. Capaian kinerja sub kegiatan tersebut sebesar 23 laporan dari target kinerja 35 laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD atau sebesar 0.14% dari target 0.21%. Tidak mencapai target kinerja karena fasilitasi penyampaian pandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap beberapa ranperda dilakukan secara bersamaan atau sekaligus.
- 2) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 98.42% dari target 100%. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan diukur berdasarkan perolehan capaian kegiatan yang mendukung. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dari 7 kegiatan, yaitu :
- a. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, dalam memfasilitasi agenda dewan terkait fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh AKD/Komisi. Capaian kinerja kegiatan sebesar 99.96% dari target 100%, yang diukur berdasarkan perolehan capaian sub kegiatan yang mendukung. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu :
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, tidak tercapai kinerja sub kegiatan karena pelaksanaannya bersifat tentative.
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran, tidak mencapai kinerja sub kegiatan karena pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran dilaksanakan secara sekaligus melalui rapat kerja Badan Anggaran pada kegiatan pembahasan kebijakan anggaran atau rapat kerja komisi.

- b. Peningkatan kapasitas DPRD, capaian kinerja kegiatan sebesar 97.33% dari target 100%, yang diukur berdasarkan perolehan capaian sub kegiatan yang mendukung. Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yaitu :
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, capaian kinerja sub kegiatan adalah 4 orang dari target kinerja 5 orang tenaga ahli Fraksi atau 3.96% dari target 4.95%. Tidak mencapai target karena belum ada nya penunjukkan tenaga ahli dari fraksi PDIP. Serta pada saat penyusunan rencana kerja sesuai dengan jumlah fraksi DPRD periode 2019-2024. Kemudian jumlah fraksi DPRD periode 2024-2029 hanya 4 fraksi dan hanya terrealisasi sebanyak 3 orang, dimana fraksi PDIP belum menunjuk tenaga ahli untuk fraksinya.
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, capaian kinerja sub kegiatan adalah 4 dokumen dari target kinerja 12 dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat atau 0.84% dari target 2.51%. Tidak mencapai target karena fasilitasi audiensi dilakukan sesuai dengan penerimaan surat permohonan audiensi. Sehingga kegiatan bersifat tentatif.
- c. Fasilitasi tugas DPRD, capaian kinerja kegiatan sebesar 91.67% dari target 100%, yang diukur berdasarkan perolehan capaian sub kegiatan yang mendukung. Tidak tercapainya target kinerja karena capaian sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebesar 11 dokumen dari target kinerja 12 dokumen atau 91.67% dari target 100%. Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan karena fasilitasi agenda DPRD sesuai dengan penerimaan undangan atau kebutuhan untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Capaian realisasi program/ kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah diupayakan untuk memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu pada tahun 2024 capaian realisasi fisik pelaksanaan program/kegiatan sebesar 98.83% dari target 100% dengan serapan anggaran sebesar 79,44% atau Rp 75.085.899.678,- dari pagu anggaran Rp 94.524.814.582,-. Artinya, pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan telah memperoleh efisiensi sumber daya sebesar 20,56%.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi indikator program yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan adalah capaian perolehan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik kesekretariatan DPRD pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Capaian perolehan indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat secara online sebesar 88,91% dari target kinerja 87%. Pencapaian tersebut juga telah melebihi target kepuasan pelayanan Pemerintah Kota Denpasar yaitu 88,66%.

Untuk level kegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan. Namun untuk sub kegiatan, terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan tercantum pada tabel 2.3. Hal ini disebabkan karena, meningkatnya kegiatan-kegiatan DPRD yang perlu difasilitasi sesuai dengan penetapan kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah:

1. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
3. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
5. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
6. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
7. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
8. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

1. Masih terdapat pegawai yang kurang memiliki kemampuan komputerasasi.

2. Terbatasnya kompetensi SDM seperti kepemilikan sertifikat PBJ Level 1 / PPK, sertifikat diklat Perencanaan/SAKIP/Manajemen Risiko/Perencanaan Penganggaran Responsif Gender/Penatausahaan Aset/Keprotokoleran/Perisalah, dll.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
4. Kurangnya inovasi/kreatifitas dan kurangnya disiplin/motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan administrasi terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
5. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan adalah realisasi program/kegiatan yang tercapai di tahun 2024 menjadi realisasi tahun ke-3 dalam renstra tahun 2021-2026. Capaian tersebut dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk pengambilan keputusan / kebijakan dalam rangka pemenuhan target kinerja di tahun berikutnya. Menuju pelayanan birokrasi yang baik dan akuntabel serta meningkatkan proses penatausahaan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan ASN dan DPRD dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi/evaluasi secara berkala antar pemangku kepentingan.
3. Mengoptimalkan perekrutan kelompok pakar AKD untuk meningkatkan kinerja DPRD.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.
6. Penguatan tim work di masing-masing bagian.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Denpasar

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2024		Realisasi Renja Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	500	%	200	%	100	%	99,58	%	99,58%	100	%	399,5	%	80%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	500	%	200	%	100	%	100,00	%	100,00%	100	%	400	%	80%
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250	Orang/Bulan	97	Orang/Bulan	47	Orang/Bulan	47	Orang/Bulan	100,00%	47	Orang/Bulan	191	Orang/Bulan	76%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	500	%	200	%	100	%	99,00	%	99,00%	100	%	399	%	80%
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55	Paket	29	Paket	14	Paket	16	Paket	100,00%	13	Paket	58	Paket	100%
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	Paket	9	Paket	5	Paket	4	Paket	80,00%	3	Paket	16	Paket	100%
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	Paket	8	Paket	3	Paket	4	Paket	100,00%	5	Paket	17	Paket	100%
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	3	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00%	1	Paket	5	Paket	100%
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	70	Dokumen	28	Dokumen	14	Dokumen	14	Dokumen	100,00%	168	Dokumen	210	Dokumen	100%
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	36	Laporan	75%
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	26	Laporan	12	Laporan	11	Laporan	91,67%	12	Laporan	49	Laporan	82%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	500	%	200	%	100	%	100,00	%	100,00%	100	%	400	%	80%
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	48	Laporan	80%
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	24	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00%	12	Laporan	48	Laporan	80%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	500	%	200	%	100	%	100,00	%	100,00%	100	%	400	%	80%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2024		Realisasi Renja Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							1	2	3	4	5			6	7	8=7/6
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25	Unit	10	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00%	5	Unit	20	Unit	80%
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150	Unit	59	Unit	29	Unit	29	Unit	100,00%	37	Unit	125	Unit	83%
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	905	Unit	272	Unit	208	Unit	208	Unit	100,00%	181	Unit	661	Unit	73%
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95	Unit	31	Unit	25	Unit	19	Unit	76,00%	19	Unit	69	Unit	73%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	500	%	200	%	100	%	98,55	%	98,55%	100	%	398,5	%	80%
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	225	Orang/Bulan	90	Orang/Bulan	45	Orang/Bulan	45	Orang/Bulan	100,00%	45	Orang/Bulan	180	Orang/ Bulan	80%
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	10	Paket	4	Paket	12	Paket	9	Paket	75,00%	4	Paket	17	Paket	100%
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	225	Orang	74	Orang	45	Orang	31	Orang	68,89%	45	Orang	150	Orang	67%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	500	%	200	%	100	%	99,93	%	99,93%	100	%	399,9	%	80%
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	25	Laporan	11	Laporan	35	Laporan	23	Laporan	65,71%	5	Laporan	39	Laporan	100%
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	110	Laporan	49	Laporan	28	Laporan	39	Laporan	100,00%	22	Laporan	110	Laporan	100%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	500	%	200	%	100	%	98,42	%	98,42%	100	%	398	%	80%
		2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	88	%	177	%	86	%	88,91	%	100,00%	89	%	89	%	100%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	500	%	200	%	100	%	100,00	%	100,00%	100	%	400	%	80%
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	Dokumen	32	Dokumen	12	Dokumen	16	Dokumen	100,00%	12	Dokumen	60	Dokumen	100%
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	90	Dokumen	42	Dokumen	18	Dokumen	22	Dokumen	100,00%	18	Dokumen	82	Dokumen	91%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2024		Realisasi Renja Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							1	Dokumen	1	Dokumen	8=7/6			10=5+7+9	11=10/4	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	15	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	6	Dokumen	40%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	500	%	200	%	100	%	100,00	%	100,00%	100	%	400	%	80%
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10	Dokumen	7	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	11	Dokumen	100%
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	8	Dokumen	80%
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	10	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	9	Dokumen	100,00%	5	Dokumen	24	Dokumen	100%
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	10	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	11	Dokumen	100%
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10	Dokumen	7	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	2	Dokumen	11	Dokumen	100%
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	500	%	200	%	100	%	99,96	%	99,96%	100	%	400	%	80%
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	120	Laporan	40	Laporan	24	Laporan	28	Laporan	100,00%	24	Laporan	92	Laporan	77%
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	120	Laporan	43	Laporan	24	Laporan	34	Laporan	100,00%	24	Laporan	101	Laporan	84%
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	120	Laporan	33	Laporan	24	Laporan	28	Laporan	100,00%	24	Laporan	85	Laporan	71%
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	120	Laporan	38	Laporan	24	Laporan	31	Laporan	100,00%	24	Laporan	93	Laporan	78%
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	2	Dokumen	2	Dokumen	20%
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	2	Dokumen	2	Dokumen	20%
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00%	2	Dokumen	3	Dokumen	30%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	500	%	200	%	100	%	97,33	%	97,33%	100	%	397	%	79%
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30	Dokumen	10	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00%	6	Dokumen	21	Dokumen	70%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024					Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2024		Realisasi Renja Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6	9		10=5+7+9		11=10/4
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30	Orang	6	Orang	3	Orang	3	Orang	100,00%	6	Orang	15	Orang	50%
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	25	Orang	10	Orang	5	Orang	4	Orang	80,00%	5	Orang	19	Orang	76%
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60	Dokumen	24	Dokumen	12	Dokumen	4	Dokumen	33,33%	12	Dokumen	40	Dokumen	67%
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	60	Dokumen	39	Dokumen	12	Dokumen	17	Dokumen	100,00%	12	Dokumen	68	Dokumen	100%
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	48	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%	12	Dokumen	36	Dokumen	75%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	500	%	200	%	100	%	100,00	%	100,00%	100	%	400	%	80%
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	3	Dokumen	11	Dokumen	73%
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	500	%	200	%	100	%	100,00	%	100,00%	100	%	400	%	80%
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	10	Laporan	9	Laporan	2	Laporan	5	Laporan	100,00%	2	Laporan	16	Laporan	100%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	500	%	200	%	100	%	91,67	%	91,67%	100	%	392	%	78%
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60	Dokumen	26	Dokumen	12	Dokumen	11	Dokumen	91,67%	12	Dokumen	49	Dokumen	82%
TOTAL			500	%	200	%	100	%	98,83	%	98,83%	100	%	398,8	%	80%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar senantiasa melaksanakannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang termasuk urusan penunjang pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah:

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; serta
- Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sementara fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Denpasar, yaitu:

- Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dari Sekretariat DPRD Kota Denpasar terdiri dari:

- Sekretaris DPRD;
- Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
- Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 sebanyak 99 orang (PNS 44 orang, PPPK 27 orang, dan Non ASN 28 orang) (cut off per 30 Juni 2025). Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah berupaya untuk pendistribusian / pendelegasian pekerjaan dengan optimal agar tetap dapat mencapai tujuan organisasi.

Berikut capaian terhadap Indikator Kinerja Utama dan capaian terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024 :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD Sasaran Strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2024

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	Persentase	85	86	87	87,5	88	87,71	88,80	88,91
2	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	98,83

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sesuai tugas dan fungsinya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD.

Dari ketiga permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah “Belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD”.

b. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

Apabila isu-isu strategis yang ada ditindaklanjuti melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik, maka capaian visi dan misi Walikota Denpasar, dan capaian program nasional tentu akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan kontribusi dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan capaian yang dimaksud.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan tantangan. Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

Faktor Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- b. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- c. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- d. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

Kelemahan :

- a. Terbatasnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang dibutuhkan.
- b. Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Faktor Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang maupun tantangan.

Peluang :

- a. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
- d. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
- e. Adanya kesempatan peningkatan kompetensi bagi ASN.

Tantangan :

- a. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- b. Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Denpasar, untuk menindaklanjuti isu strategis terkait pelayanan itu sendiri yaitu belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD. Adapun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Kota Denpasar dengan “Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD dan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” melalui :

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya.
2. Pembentukan tim inovasi sebagai tim penggerak untuk meningkatkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan disiplin / motivasi kerja yang lebih baik.
3. Melaksanakan pengadaan barang / jasa yang sesuai kebutuhan dan dilakukan secara epurchasing sebagai upaya mewujudkan transparasi dan akuntabel dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Serta mendukung percepatan peningkatan PDN dan produk UMKM sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Mengusulkan permohonan Surat Rekomendasi kepada Tim P3DN lebih awal apabila setelah survey pasar tidak ditemukan penyedia yang memenuhi ketentuan kepemilikan TKDN dan BMP.
5. Pengoptimalan dalam pendelegasian tugas sebagai tim teknis pembantu / pendukung PPK dalam proses persiapan pengadaan barang/jasa dengan penyusunan SK Kepala Perangkat Daerah.
6. Melakukan pencermatan dan koordinasi yang lebih intens dengan APIP dan Tim TAPD dalam proses penyusunan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan penganggaran.
7. Memperkuat sistem pengawasan internal secara rutin/berkala dengan melakukan dialog kinerja sesuai dengan rentang kendalinya serta didokumentasikan sebagai wujud akuntabilitas kinerja.
8. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan peningkatan kapasitas / peningkatan kompetensi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menindaklanjuti Surat Edaran Bappeda Kota Denpasar Nomor 000.7.2.4/134/BAPPEDA tanggal 3 Februari 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Sekretariat DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan awal

Renja perangkat daerah menjadi dasar penyusunan RKPD Kota Denpasar.

Penyusunan rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar juga telah dibahas bersama Sekretaris DPRD beserta pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada Senin, 24 Februari 2025 secara daring. Tujuan forum untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, yang dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan perwakilan peserta forum yang hadir. Usulan rancangan kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan 2 program, 13 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 104.879.561.448,-.

Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MUSRENBANG RKPD) Kota Denpasar Tahun 2026 sesuai Surat dari Bappeda Kota Denpasar Nomor 000.7.2.4/331/Bappeda tanggal 10 Maret 2025, pada acara pembahasan Program dan Kegiatan Tahun 2026 yang dilaksanakan sesuai kelompok. Berdasarkan hasil sidang kelompok tersebut, berikut hasil pencermatan perencanaan dan penganggaran tahun 2026 :

1. Penyesuaian beberapa belanja barang/jasa sesuai dengan draft Perwali Standar Harga Satuan pada sub kegiatan : (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; (3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; (4) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; (5) Publikasi dan Dokumentasi Dewan.
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, penambahan penganggaran belanja Pengisian Tabung Gas Pemadam yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan dihapus dan seluruh pendanaan belanja yang sudah dianggarkan, dialokasi ke sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam rangka mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana menjadi lebih efektif.
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terdapat penyesuaian belanja perjalanan dinas sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdapat penambahan penganggaran atas realokasi beberapa belanja dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, serta penambahan alokasi anggaran jasa pengelolaan sampah tahun 2026.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, maka kebutuhan rencana kerja tahun 2026 berkurang sebesar Rp 43.061.000,- dari rancangan awal hasil FPD sebesar Rp 104.879.561.448,- menjadi Rp 104.833.000.448,-. Kemudian dilakukan pencermatan kembali dan penyempurnaan penyusunan perencanaan anggaran yang mengacu pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2026, sehingga kebutuhan pendanaan rancangan akhir rencana kerja tahun anggaran 2026 menjadi Rp 104.823.901.692,-. Berikut review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kota Denpasar

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.02	SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	66.027.443.448	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	65.619.995.692	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	11.577.580.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	11.222.174.000	
4.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	11.577.580.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan	11.222.174.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	2.973.509.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	2.819.254.000	
4.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	1.366.291.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.440.242.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	129.216.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	129.752.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	222.052.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	Sub kegiatan dihapus
4.02.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	117.580.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	117.580.000	
4.02.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	742.956.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	742.956.000	Perubahan Target
4.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	183.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	173.700.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	211.814.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	215.024.000	Perubahan Pendanaan

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2.793.097.848	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2.890.602.192	
4.02.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	492.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	492.000.000	
4.02.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.301.097.848	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.398.602.192	Perubahan Pendanaan
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.686.845.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.738.267.000	
4.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	456.997.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	455.897.000	Perubahan Pendanaan
4.02.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	845.207.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	802.650.000	Perubahan Pendanaan
4.02.01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	364.741.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	226 Unit	459.820.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	1.019.900.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	1.019.900.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	45.537.041.000	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	45.490.328.500	
4.02.01.2.15.001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44.370.501.000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44.370.501.000	
4.02.01.2.15.002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	961.290.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	944.390.000	Perubahan Pendanaan

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.02.01.2.15.003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	205.250.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	175.437.500	Perubahan Pendanaan
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	459.370.000	Layanan Administrasi DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	459.370.000	
4.02.01.2.16.002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	3.750.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	3.750.000	
4.02.01.2.16.003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	455.620.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	455.620.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Denpasar	Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	38.805.557.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Denpasar	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100%	853.068.000	Penyesuaian Indikator Program sesuai Imendagri Nomer 2 Tahun 2025
			Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	88%				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	2.408.276.000	
								Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	35.942.562.000	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.336.604.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.408.276.000	
4.02.02.2.01.001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	451.258.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 Dokumen	490.228.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.01.002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	11 Dokumen	1.755.596.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	23 Dokumen	1.788.298.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.01.004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	129.750.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	129.750.000	Perubahan Target
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	770.384.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	853.068.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.02.02.2.02.001	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	9.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	Perubahan Target
4.02.02.2.02.002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	9.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	Perubahan Target
4.02.02.2.02.003	Pembahasan APBD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	734.384.000	Pembahasan APBD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	817.068.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.02.004	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	9.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000	Perubahan Target
4.02.02.2.02.006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	9.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000	Perubahan Target
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Denpasar	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	12.579.814.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Denpasar	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	13.033.315.000	
4.02.02.2.03.001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	6 Laporan	2.885.807.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30 Laporan	2.999.635.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.03.002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6 Laporan	3.320.216.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30 Laporan	3.425.767.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.03.003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6 Laporan	3.084.510.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30 Laporan	3.195.628.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.03.004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 Laporan	3.274.281.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30 Laporan	3.397.285.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.03.006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.000.000	
4.02.02.2.03.007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	3.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.02.02.2.03.008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	6.900.765.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	6.732.677.000	
4.02.02.2.04.002	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	4.503.578.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	4.521.908.000	Perubahan Pendanaan
4.02.02.2.04.004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 Orang	972.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	972.000.000	Perubahan Target
4.02.02.2.04.005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang	259.200.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	2 Orang	259.200.000	Perubahan Target
4.02.02.2.04.006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	249.200.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	12.000.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.04.007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	606.446.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	15 Dokumen	675.428.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.04.008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	310.341.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	292.141.000	Perubahan indikator kinerja dan pendanaan
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.640.950.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.442.500.000	
4.02.02.2.05.003	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.640.950.000	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.442.500.000	Perubahan Pendanaan
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	231.394.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	259.656.000	
4.02.02.2.06.002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	231.394.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	259.656.000	Perubahan Target dan Pendanaan
4.02.02.2.08	Fasilitas Tugas DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100%	12.345.646.000	Fasilitas Tugas DPRD	Kota Denpasar	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100%	12.474.414.000	
4.02.02.2.08.0	Koordinasi dan Konsultasi	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	12	12.345.646.000	Koordinasi dan Konsultasi	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	12	12.474.414.000	Perubahan

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
001	Pelaksanaan Tugas DPRD	Denpasar	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		Pelaksanaan Tugas DPRD	Denpasar	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Dokumen</i>		Pendanaan
JUMLAH					104.833.000.448	JUMLAH					104.823.901.692

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Usulan Pokok Pikiran yang berasal dari Musrenbang RKPD Kota Denpasar tahun 2026 di Kecamatan dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Denpasar Tahun 2026, serta telaah Usulan Langsung Masyarakat dan Usulan Reses DPRD. Sekretariat DPRD Kota Denpasar tidak memiliki Usulan Pokir.

Tabel 2.5 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Denpasar

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersinergi pada seluruh aspek pemerintahan mulai dari skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, maka dilakukan penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pusat hingga ke daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, prioritas nasional ke-7 yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan mendukung peningkatan produktivitas untuk mencapai swasembada pangan dan energi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Reformasi birokrasi diarahkan pada digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi. Sasaran utama pada prioritas nasional ke-7 yang selaras dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani, yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran utama tersebut, dilaksanakan arah kebijakan dengan melaksanakan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani melalui tranformasi tata kelola pelayanan publik. Melalui penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem pengawasan internal, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan integritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian indeks reformasi birokrasi Kota Denpasar dan indeks reformasi birokrasi nasional.

Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2026 terintegrasi dalam mendukung visi Provinsi Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan mewujudkan misi Provinsi Bali ke-22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Selaras juga dengan visi Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dan mewujudkan Misi Kota Denpasar ke-3 yaitu kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2026 adalah Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Berdasarkan isu strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang masih menjadi catatan perbaikan terkait pelayanan itu sendiri yaitu belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD. Maka perumusan tujuan dan sasaran tahun 2026 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar

No	Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran	Target
Renstra Tahun 2021-2026				
1	Tujuan	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	91.18%
2	Sasaran Strategis	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
Rancangan Renstra Tahun 2025-2029				
1	Tujuan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP (Nilai evaluasi AKIP internal)	84%
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
			Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	91.18%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penyesuaian tujuan dan sasaran dalam rangka menindaklanjuti amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan menyelaskan dokumen perencanaan tingkat kota dengan perangkat daerah. Tujuan perangkat daerah adalah sasaran strategis tingkat pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Sasaran startegis perangkat daerah dirumuskan untuk menjawab isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dengan menyesuaikan urusan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mendukung pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

3.2.1 Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Visi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2026 adalah **“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”**.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah Misi Ke-3 yaitu **“Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”**.

Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya yang dapat Sekretariat DPRD Kota Denpasar lakukan mendukung capaian tersebut dengan efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan. Tujuan pelaksanaan Misi Ke-3 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Dalam rangka mewujudkan tujuan misi ke-3 Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar merumuskan sasaran strategis. Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar, tujuan perangkat daerah adalah sasaran strategis tingkat pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Sehingga tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 mengalami penyesuaian dari Renstra Tahun 2021-2026. Tujuan pada Renstra tahun 2021-2026 sebelumnya adalah **“Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD”** menjadi **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi”**. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan perangkat daerah atau sasaran strategis misi ke-3 Pemerintah Kota Denpasar yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah Nilai SAKIP. Penilaian SAKIP yang diberikan oleh MenpanRB tentu didukung dari pelaksanaan evaluasi AKIP internal perangkat daerah. Nilai evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah internal pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar dilakukan oleh APIP / Inspektorat Kota Denpasar. Penilaian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir. Penilaian implementasi AKIP berpedoman pada PermenpanRb Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan sub komponen terdiri dari keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan pada masing-masing komponen.

Tabel 3.1.1 Tren Capaian Kinerja Nilai Evaluasi AKIP Internal Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Rasio Pertumbuhan			Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Nilai SAKIP (Nilai Evaluasi AKIP Internal)	74.51	75.65	77.65	80.75	1.81	2.36	3.99	2.7

Berdasarkan tabel di atas, perumusan target kinerja berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya. Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 atas Implementasi SAKIP Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar Nomor 700.1.2.7/1267/ITKO tanggal 6 Mei 2024 disampaikan hasil akhir penilai yang dilakukan oleh APIP Kota Denpasar adalah 80,75 atau predikat “A”. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan capaian kinerja nilai evaluasi AKIP Internal digunakan sebagai dasar merumuskan target kinerja tahun 2025-2029 dengan besaran 2,7 kali atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Berikut perumusan target kinerja berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1.2 Tujuan dalam Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (sasaran misi ke-3)	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP (Nilai evaluasi AKIP internal)	82	84	86	88	90	92

3.1.2 Sasaran Strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD yang diukur dengan persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan rancangan renstra tahun 2025-2029 yang sedang dalam proses penyusunan, sasaran strategis disesuaikan menjadi ”meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD”. Penajaman indikator kinerja utama dirumuskan dalam rangka pemenuhan kriteria indikator yang SMART (*specific, measurable, attainable, relevan, timebound*).

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar, maka dirumuskan indikator kinerja utama yang dipergunakan untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki kualitas penetapan kebijakan, kualitas kinerja pelayanan kesekretariatan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar yang diukur dan didukung dengan data-data yang akuntabel.

1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Rumus yang digunakan mengukur indikator kinerja utama ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan yang terdapat pada rencana kerja DPRD}} \times 100\%$$

Definisi operasional dan sumber data :

- Jumlah kegiatan DPRD yang dapat difasilitasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD dan pelaksanaannya berpedoman pada penetapan jadwal agenda dewan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD.
- Jumlah kegiatan yang terdapat pada rencana kerja DPRD dibuat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna dalam bentuk Keputusan DPRD. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja DPRD tahun bersangkutan.

Perumusan target kinerja berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya. Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan tahun 2024 yang termuat dalam LKJIP Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah 100%. Sehingga target kinerja tahun 2026-2030 ditargetkan 100% setiap tahun, yang artinya agenda dewan yang jabarkan dalam Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD terfasilitasi dengan optimal.

2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD

Rumus yang digunakan mengukur indikator kinerja utama ini adalah :

- Nilai SKM = Nilai Indeks x (0,11) x Nilai Dasar (25)
- Nilai indeks = Nilai rata-rata per unsur pelayanan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden x 0,11

Unsur pelayanan yang survei kepuasan sesuai PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 :

- Persyaratan
- Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif
- Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- Sarana dan Prasarana

Perumusan target kinerja berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya. Capaian kinerja tingkat kepuasan Layanan kesekretariatan DPRD tahun 2024 yang termuat dalam Laporan SKM dan LKJIP Sekretariat DPRD yang disusun setiap semester yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1.3 Tren Capaian Kinerja Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Rasio Pertumbuhan			Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Persentase Kepuasan Layanan kesekretariatan DPRD	85.62	87.71	88.8	88.91	2.44	1.24	0.12	1.27

Adapun kondisi awal tahun penyusunan Renja Tahun 2026 berdasarkan Laporan Semester II Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 disampaikan bahwa capaian persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD sebesar 88.91. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pertumbuhan digunakan sebagai dasar merumuskan target kinerja tahun 2025-2029 dengan besaran sebesar 1.27 kali atau lebih besar dari tahun sebelumnya. Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 90.04. Berikut perumusan target sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar berdasarkan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1.4 Sasaran dalam Rancangan Renstra Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi (sasaran misi ke-3)	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	90,04%	91,18%	92,34%	93,51%	94,70%	95,90%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :
- Melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang tertuang dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 dan berpedoman pada nomenklatur penyelenggaraan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2016;
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar hingga tahun 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009;
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021;
 - Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
 - Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2026; dan
 - Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai amanat Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, dalam hal kesetaraan pemberian hak perolehan kesempatan dan berperan dalam seluruh kegiatan, melaksanakan pemberian hak cuti khusus pada wanita hamil / melahirkan, mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan untuk kesetaraan gender khususnya pada jumlah ketersediaan dan perawatan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan, kesetaraan memperoleh kesempatan mengikuti kursus/ bimtek/ sertifikat/ peningkatan kompetensi/ studi banding.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja pada Tahun 2026 terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan, 42 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp 104.823.901.692,- yang bersumber dari APBD. Perumusan program kegiatan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Program Prioritas / Utama :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini bertujuan untuk pemenuhan fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar terhadap tugas dan fungsi DPRD secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026.

Program Penunjang :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk pemenuhan layanan kesekretariatan melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, fasilitasi layanan hak keuangan dan administratif DPRD, serta penyediaan kebutuhan rutin perangkat daerah sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Denpasar**

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.02	SEKRETARIAT DPRD								
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Kota Denpasar	100%	65.619.995.692			100%	72.433.847.693
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	Kota Denpasar	100%	11.222.174.000			100%	12.735.338.660
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar	71 Orang/Bulan	11.222.174.000	PAD, DAU		68 Orang/Bulan	12.735.338.660
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	Kota Denpasar	100%	2.819.254.000			100%	3.029.169.000
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Denpasar	12 Paket	1.440.242.000	SILPA		10 Paket	1.506.987.900
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Denpasar	6 Paket	129.752.000	SILPA		5 Paket	122.745.700
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Denpasar	1 Paket	117.580.000	SILPA		1 Paket	129.338.000
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Denpasar	14 Dokumen	742.956.000	SILPA		12 Dokumen	817.251.600
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar	12 Laporan	173.700.000	SILPA		12 Laporan	201.960.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar	12 Laporan	215.024.000	SILPA		12 Laporan	250.885.800
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	Kota Denpasar	100%	2.890.602.192			100%	3.072.407.633

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Denpasar	12 Laporan	492.000.000	SILPA		12 Laporan	541.200.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Denpasar	12 Laporan	2.398.602.192	SILPA		12 Laporan	2.531.207.633
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Denpasar	100%	2.738.267.000			100%	3.000.781.300,00
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar	5 unit	455.897.000	SILPA		5 unit	500.584.700
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar	33 Unit	802.650.000	SILPA		33 Unit	993.591.500
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar	226 Unit	459.820.000	SILPA		226 Unit	401.215.100
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar	13 Unit	1.019.900.000	SILPA		13 Unit	1.105.390.000
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar	100%	45.490.328.500			100%	50.090.844.100
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Denpasar	45 Orang/Bulan	44.370.501.000	SILPA		45 Orang/Bulan	48.807.551.100
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Denpasar	2 Paket	944.390.000	SILPA		2 paket	1.057.518.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar	45 Orang	175.437.500	SILPA		45 Orang	225.775.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Kota Denpasar	100%	459.370.000			100%	505.307.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar	4 Laporan	3.750.000	SILPA		4 Laporan	4.125.000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar	24 Laporan	455.620.000	SILPA		24 Laporan	501.182.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Kota Denpasar	100%	853.068.000			100%	847.422.400
		2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		100%	2.408.276.000			100%	2.570.264.400
		3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		100%	35.942.562.000			100%	39.271.725.900
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar	100%	2.408.276.000			100%	2.570.264.400
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar	15 Dokumen	490.228.000	SILPA		15 Dokumen	496.383.800
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar	23 Dokumen	1.788.298.000	SILPA		27 Dokumen	1.931.155.600
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Denpasar	1 Dokumen	129.750.000	SILPA		1 Dokumen	142.725.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar	100%	853.068.000			100%	847.422.400
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar	2 Dokumen	9.000.000	SILPA		2 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar	2 Dokumen	9.000.000	SILPA		2 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Denpasar	2 Dokumen	817.068.000	SILPA		2 Dokumen	807.822.400
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar	2 Dokumen	9.000.000	SILPA		2 Dokumen	9.900.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar	2 Dokumen	9.000.000	SILPA		2 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kota Denpasar	100%	13.033.315.000			100%	13.837.795.400
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar	30 Laporan	2.999.635.000	SILPA		30 Laporan	3.174.387.700
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar	30 Laporan	3.425.767.000	SILPA		30 Laporan	3.652.237.600
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar	30 Laporan	3.195.628.000	SILPA		30 Laporan	3.392.961.000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar	30 Laporan	3.397.285.000	SILPA		30 Laporan	3.601.709.100
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar	1 Dokumen	3.000.000	SILPA		1 Dokumen	3.300.000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar	1 Dokumen	3.000.000	SILPA		1 Dokumen	3.300.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar	1 Dokumen	9.000.000	SILPA		1 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar	100%	6.732.677.000			100%	7.594.141.500
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar	6 Dokumen	4.521.908.000	SILPA		6 Dokumen	4.953.935.800
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar	4 Orang	972.000.000	SILPA		4 Orang	1.069.200.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar	2 Orang	259.200.000	SILPA		2 Orang	285.120.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar	1 Dokumen	12.000.000	SILPA		1 Dokumen	274.120.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Denpasar	15 Dokumen	675.428.000	SILPA		15 Dokumen	667.090.600
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Denpasar	12 Dokumen	292.141.000	SILPA		12 Dokumen	344.675.100
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar	100%	3.442.500.000			100%	4.005.045.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar	3 Dokumen	3.442.500.000	SILPA		3 Dokumen	4.005.045.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar	100%	259.656.000			100%	254.533.400
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar	2 Laporan	259.656.000	SILPA		2 Laporan	254.533.400
4.02.02.2.08	Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	Kota Denpasar	100%	12.474.414.000			100%	13.580.210.600
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar	12 Dokumen	12.474.414.000	SILPA		12 Dokumen	13.580.210.600
JUMLAH					104.823.901.692				115.123.260.393

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	SEKRETARIAT DPRD			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	65.619.995.692
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	11.222.174.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/Bulan	11.222.174.000
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	2.819.254.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.440.242.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	129.752.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	117.580.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	742.956.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	173.700.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	215.024.000
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2.890.602.192
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	492.000.000
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.398.602.192
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.738.267.000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	455.897.000
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	802.650.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
12	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	226 Unit	459.820.000
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	1.019.900.000
V	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	45.490.328.500
14	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44.370.501.000
15	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	944.390.000
16	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	175.437.500
VI	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	459.370.000
17	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	3.750.000
18	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	455.620.000
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100%	853.068.000
		2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100%	2.408.276.000
		3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	35.942.562.000
VII	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.408.276.000
19	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 Dokumen	490.228.000
20	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	23 Dokumen	1.788.298.000
21	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	129.750.000
VIII	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	853.068.000
22	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000
23	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000
24	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	817.068.000
25	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000
26	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000
IX	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	13.033.315.000
27	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	30 Laporan	2.999.635.000
28	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	30 Laporan	3.425.767.000
29	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	30 Laporan	3.195.628.000
30	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30 Laporan	3.397.285.000
31	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	3.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2026

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
32	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	3.000.000
33	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	9.000.000
X	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	6.732.677.000
34	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	4.521.908.000
35	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 Orang	972.000.000
36	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	2 Orang	259.200.000
37	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	12.000.000
38	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	15 Dokumen	675.428.000
39	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	292.141.000
XI	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.442.500.000
40	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.442.500.000
XII	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	259.656.000
41	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	259.656.000
XIII	Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100%	12.474.414.000
42	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12.474.414.000
TOTAL				104.823.901.692

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja
Renstra Tahun 2021-2026			
1	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	%	88%
2	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	%	100%
Rancangan Renstra Tahun 2026-2030			
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100%
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100%
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	100%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan perumusan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud juga menjadi indikator kinerja kunci pada rancangan Renstra Tahun 2026-2030. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029, telah dirumuskan indikator kinerja daerah yang merupakan alat ukur untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat DPRD sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahannya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah melalui program prioritas pembangunan yaitu indikator kinerja dari program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Indikator kinerja program tersebut mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yaitu terdiri dari :

1. Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N, dalam rangka menguji kesesuaian antara target waktu yang telah ditetapkan sejak ranperda disampaikan kepada DPRD sampai dengan keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan APBD. Ketepatan ini penting untuk memastikan efektivitas APBD dalam mendukung pembangunan daerah dan standar pelayanan publik khususnya :
 - Pelayanan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan
 - Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan
 - Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD

2. Persentase penetapan Ranperda Tahun N, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang disetujui DPRD}}{\text{Jumlah Rencana Ranperda dalam Propemperda}} \times 100\%$$

Definisi operasional :

- Ranperda yang disetujui DPRD tahun N, sesuai dengan output keputusan pada saat rapat paripurna DPRD. Fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yaitu "Pelayanan pembahasan rancangan Peraturan Daerah"
- Rencana Ranperda dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengawasan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pengawasan pada Renja DPRD}} \times 100\%$$

Definisi operasional :

- Jumlah kegiatan pengawasan yang difasilitasi, merupakan realisasi pelaksanaan pelayanan publik seperti Pelayanan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pelayanan fasilitasi fungsi pengawasan DPRD, Pelayanan pelaksanaan reses dan pokok-pokok pikiran DPRD, dan fasilitasi lainnya sesuai jadwal agenda dewan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar setiap bulan.
- Jumlah kegiatan pengawasan pada Renja DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Sekretariat DPRD, dan perumusan kebijakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Denpasar merumuskan 2 (dua) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp 104.823.901.692,-

Untuk dapat mengoptimalkan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026 ini, tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan, kualitas SDM, serta sarana dan prasarana yang memadai. Realisasi rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2024 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran dan merumuskan program dan kegiatan untuk rencana kerja tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 2 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Denpasar Tahun 2026**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 2 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I / Gol. IV b
NIP. 196811141998031003

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3.3/2052/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagai Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Walikota Kepada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026;
 - b. menyiapkan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintah;
 - c. menyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026;
 - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2026; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 November 2024

a.n. Walikota Denpasar,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar,



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024
NOMOR : 100.3.3.3/2052/HK/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota
Denpasar
- Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar
2. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan
Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar

4. Seluruh Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar,



H. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
Pembina Tk. I/ Gol IV/b
NIP. 196811141998031003